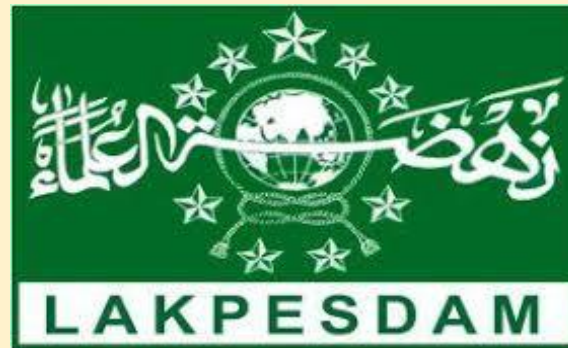


# Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal



# Tentang Program Inovasi

1. Program terkait pendampingan pelayanan public untuk kelompok marginal berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tahun 2015 dalam payung Program Peduli
2. Program ini focus pada inklusi sosial yang meliputi layanan identitas, penerimaan sosial, dan perbaikan kebijakan untuk kelompok marginal
3. Program Peduli memiliki 5 (pilar), termasuk pilar agama dan kepercayaan yang menjadi wilayah dampingan di Indonesia
4. Lakpesdam PBNU sebagian bagian dari lembaga NU yang focus pada riset dan pendampingan terpanggil untuk mendampingi kelompok minoritas yang dimarginalkan dalam beragam bentuk baik secara sosial, ekonomi maupun politik
5. Lakpesdam bermitra dengan 13 cabang Lakpesdam yang tersebar di NAD, NTB, Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, dan Kalteng

# Mengapa Inklusi Sosial

1. Inklusi sosial adalah proses membangun hubungan sosial dan menghormati individu serta komunitas, sehingga mereka yang marjinal dan mengalami prasangka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, serta memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber daya (untuk memenuhi kebutuhan dasar) dalam rangka menikmati standar kesejahteraan yang dianggap layak di dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan. Inklusi sosial dengan demikian mampu untuk mengidentifikasi model kesejahteraan, prinsip keadilan sosial, dan martabat manusia
2. Inklusi sosial dan kemiskinan: Inklusi sosial memandang “orang miskin” bukan satu kelompok yang homogen tetapi memiliki perbedaan berdasar etnisitas, ras, perbedaan fisik, orientasi seksual. Argumen dasarnya adalah perbedaan identitas menjadi faktor yang mendasari terjadinya kemiskinan. Inklusi Sosial mensyaratkan analisis yang mampu mengungkapkan penyebab dasar kemiskinan
3. Inklusi sosial dan kesejahteraan/kebahagiaan: Inklusi sosial menambah konsep kesejahteraan. Pada pasal 2 UU Nomor 6 tahun 1974 ketentuan kesejahteraan sosial yaitu; suatu tata kehidupan dan penghidupan materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin. Yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat yang menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban sesuai dengan pancasila. Inklusi sosial mampu menangkap bahwa ada sumber ketidaksejahteraan yang sangat lama yang menyebabkan kelompok tertentu tidak merasa aman, selamat, tidak mampu menjalankan hak rohaniah oleh sebab perbedaan identitas yang melahirkan pengucilan

# Tentang Program (2)





# Tentang Program (3)



# Daerah Dampungan

1. Banda Aceh (NAD)
2. Bima (NTB)
3. Mataram (NTB)
4. Sampang (Jatim)
5. Kencong (Jatim)
6. Cilacap (Jateng)
7. Jepara (Jateng)
8. Cimahi (Jabar)
9. Kuningan (Jabar)
10. Tasikmalaya (Jabar)
11. Indramayu (Jabar)
12. Bulukumba (Sulsel)
13. Sampit (Kalteng)

# Kajian Terkini

- Hasil kajian Lakpesdam PBNU di 13 Kabupaten/Kota tentang kelompok marginal (kelompok yang terkena eksklusi sosial) menemukan fakta bahwa
  1. Mereka tidak diterima secara social
  2. Mereka mengalami masalah dalam mengakses layanan public
  3. Ada kebijakan yang mendiskriminasi
- Termasuk dalam kelompok yang dieksklusi adalah **minoritas agama/keyakinan, kelompok adat, disabilitas, perempuan dan anak, dan korban konflik**. Dalam kajian lain adalah kelompok transpuan juga mengalami perkembangan senada

# Basis Masalah

1. Struktur: ada tata kelola pemerintahan yang tidak efektif, oleh sebab tekanan politik, lack of capacity. Ini adalah problem politik. Masalah utamanya ada pada struktur yakni ineffective of the good governance.
2. Paradigma: ada paradigma intoleran. Karena paradigm maka masalahnya adalah seperti pemahaman atas keyakinan agama/kepercayaan yang keras, anti yang lain.
3. Tetapi dalam kinerja Lakpesdam selama 5 (lima) tahun terakhir meletakkan masalah utama adalah masalah politik. Oleh sebab itu, kinerja selama periode ini bekerja dengan pendekatan *Thinking and Working Politically*. Bukan dengan pendekatan berbasis agama (*religious based*) melainkan dengan pendekatan berbasis kepentingan (*interest based*).



# Model Layanan/Program

## Kluster Model

- Kelompok adat
  - model antar-jemput untuk pelayanan identitas di Bulukumba dan Indramayu
- Kelompok disabilitas
  - RBM (Rehabilitasi Berbasis Masyarakat) berbasis komunitas di Tasikmalaya
- GEMASKAN (Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan) di Mataram
- Pelayanan PTSL secara gratis bagi korban konflik di Sampang
- Festival SKPD di Indramayu dan Tasikmalaya
- Forum Musrenbang Anak di Bulukumba (Desa Bialo)
- Forum Warga di Banda Aceh
- SPKK (Sekolah Perempuan Puger Kreatif) di Kencong
- Pelayanan pengurusan jenazah untuk penghayat di Cilacap

# Diskusi

- Istilah kelompok marginal/kelompok rentan
- Bentuk paparan (modul diklat dan lainnya)

# Daerah Dampungan

No	Nama Daerah Status Kepmendagri	Status	Nama Daerah Status LAN – Lakpesdam	Keterangan
1	NAD	Sangat inovatif		
2	NTB	Kurang inovatif	Bima	Kurang inovatif
3	Jatim	Sangat inovatif		
4	Jateng	Sangat inovatif	Jepara	Kurang inovatif
5	Jabar	Sangat inovatif	Tasikmalaya	Kurang inovatif
6	Sulsel	Sangat inovatif	Bulukumba	Kurang inovatif
7	Kalteng	Kurang inovatif		

# Kelompok Marginal/Kelompok Rentan

- LAN

- 1. Daerah 3 T**

- 2. Perpres RI Nomor 63 tahun 2002 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024**

- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten Kota Tahun 2020**

- Lakpesdam

1. SDGs point 1 (Memberantas Kemiskinan) dan point 5 (Kesetaran Gender)

2. Hasil assessment Lakpesdam dengan perspektif inklusi sosial

# Kelompok Marginal (2)

## Komisi Ombudsman

- Marginal adalah daerah atau kelompok yang tidak bisa memperoleh akses pelayanan publik secara wajar disebabkan karena kondisi daerah atau kelompok tersebut masih di bawah marjin, baik yang bentuknya given maupun constructed, spasial dan social
- Kaum marginal sering diartikan sebagai kelompok masyarakat pra-sejahtera, berada di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Di perkotaan, mereka mempertahankan hidupnya dengan menjadi pemulung, pengemis, gelandangan, atau buruh kasar. Di pedesaan, mereka biasanya adalah golongan petani miskin atau buruh tani, Petret Pelayanan Publik di Daerah dan Kelompok Marginal 31 nelayan, peladang atau pekerja kebun, yang biasanya tinggal di daerah terpencil, sulit dijangkau, atau minim infrastruktur
- Istilah marginal ini muncul berdasarkan tolak ukur atau patokan-patokan ekonomi, sehingga analisa yang digunakan seringkali menggunakan pendekatan ekonomi, sementara masalah yang harus ditanggung kelompok ini bersifat sosial dan juga politik. Misalnya akses mereka terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan seringkali terkendala. Selain itu, kelompok marginal juga mencakup di dalamnya para penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya

# Kelompok Marjinal (3)

- Kelompok marginal ditinjau dari nomenklatur K/L:
  - Ditinjau dari sisi geografis (daerah): merupakan daerah/desa tertinggal, terluar, terpencil, perbatasan yang akses menuju wilayah tersebut dapat dikategorikan sulit;
  - Ditinjau dari sisi ekonomi: merupakan individu/keluarga yang termasuk dalam kategori ekonomi lemah dan miskin;
  - Ditinjau dari sisi adat/budaya: merupakan kelompok adat dan penghayat agama lokal yang karena kepercayaannya mendapatkan kesulitan mengakses pelayanan pemerintah;
  - Berkebutuhan khusus: kelompok/anak berkebutuhan khusus, lansia, perempuan, anak, yang rentan terhadap akses mengakses pelayanan pemerintah
- Tidak ada istilah atau nomenklatur solid dan seragam yang merujuk kepada satu kriteria daerah dan kelompok marginal walaupun pada kenyataannya telah terdapat beberapa istilah pada program K/L yang merujuk kepada dua bentuk marginalitas, yaitu majinalitas yang bersifat sosial (societal) dan spasial (spatial).



# Modul

- Modul LAN
- Modul Lakpesdam



Terima  
Kasih